

1. PERADIAN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

2. KESELAMATAN KERJA - ASPEK HUKUM

SKRIPSI

KK
Per 83/99
Pra
P

NUGROHO DIAN PRASETYO

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI PT SATELINDO UJUNG PANDANG

"DITINJAU DARI UU NO. 1/1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA"



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA

DI PT SATELINDO UJUNG PANDANG

"DITINJAU DARI UU NO. 1/1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA"

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Meraih Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing



Dr. M.L. Souhoka, S.H., MS.
NIP. 130 873 453

Penyusun



Nugroho Dian Prasetyo
NIM. 039313812

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

1998/1999

Skripsi dengan Judul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA

DI PT. SATELINDO UJUNG PANDANG

"DITINJAU DARI UU NO. 1/1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA "

Telah diuji pada

Hari : Senin

Tanggal : 26 Juli 1999

Oleh Tim Penguji:

Ketua : R. Indarsoro, S.H.

Anggota : 1. Dr. M.L. Souhoka, S.H., MS.

2. Machsoem Ali, S.H., MS.

3. Lanny Ramli, S.H., M. Hum.

BAB IV

PENUTUP

Dalam bab terakhir dari skripsi ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran penulis, yang ditarik berdasarkan hasil-hasil analisis dan pembahasan data penelitian, yang diperoleh dari responden dan informasi dari PT. Satelindo cabang Ujung Pandang.

4.1 Kesimpulan

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas kerja di PT Satelindo Ujung Pandang, pihak perusahaan berusaha senantiasa menjaga keharmonisan berlangsungnya penunaian hak dan kewajiban pekerja di dalam melaksanakan pekerjaannya. Hak dan kewajiban pekerja yang dalam pelaksanaannya dijamin oleh perusahaan, berkaitan dengan hal upaya terhadap perlindungan keselamatan kerja karyawan. PT Satelindo Ujung Pandang juga telah menetapkan atau membuat ketentuan dan peraturan-peraturan mengenai hak dan kewajiban pekerja serta pelaksanaannya secara jelas dan terinci. Ketentuan dan peraturan yang disusun oleh perusahaan tersebut mengambil acuan dan sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Penjabaran ketentuan-ketentuan yang jelas bagi

para karyawan, disertai dengan penyuluhan atau pelatihan keterampilan, diarahkan untuk lebih meningkatkan kesadaran akan tugas, kewajiban dan hak-hak karyawan yang pada akhirnya di antara para karyawan akan tertanam rasa memiliki terhadap asset perusahaan (*sense of belonging*) secara penuh. Sebagai timbal balik bagi pekerja yang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka telah menjadi kewajiban pula bagi perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerjanya secara wajar dan layak.

2. Bahwa penyelenggaraan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Satelindo cabang Ujung Pandang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama UU Nomor 1 Tahun 1970. Upaya-upaya pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan melalui pendekatan yuridis edukatif berdasarkan jiwa dan semangat ketentuan perundang-undangan yang telah dijabarkan dalam ketentuan tersendiri sebagai pedoman kerja perusahaan tersebut. Jenis dan bentuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Satelindo cabang Ujung Pandang ditujukan untuk keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan perusahaan baik fisik maupun psikis, yang antara lain berupa : penyediaan peralatan kerja, pakaian kerja, makan/uang pengganti makan, dan perhatian masalah ibadah karyawan yang didasarkan pada tingkat tugas dan tanggung jawab (*jobs and responsibility*) masing-masing karyawan.

4.2 Saran

Bertolak dari kesimpulan di atas maka penulis mengemukakan saran bagi PT. Satelindo di Ujung Pandang sebagai berikut :

1. Kepada pihak Perusahaan hendaknya menyediakan satu bagan kerja yang khusus dalam menangani masalah pemenuhan hak bagi karyawan sehingga lebih terjamin, dan dalam pelaksanaan kewajibannya agar tidak akan terjadi saling lempar tanggung jawab di antara para karyawan. Perusahaan hendaknya juga menambah frekuensi penyuluhan hukum mengenai pentingnya perlindungan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pekerja, terutama tentang hak keselamatan kerja, melalui kerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja guna mensosialisasikan berbagai ketentuan dibidang keselamatan kerja khususnya pentingnya alat-alat pelindung diri;
2. Upaya yang ditempuh perusahaan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja, hendaknya dilengkapi dengan penilaian terhadap pekerja dalam melaksanakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh perusahaan khususnya aturan tentang keselamatan kerja yang dibuat oleh perusahaan .